

ABSTRAK

Masalah persampahan merupakan persoalan lingkungan yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk serta pola konsumsi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung merespons persoalan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda tersebut dijalankan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan dua variabel utama dalam keberhasilan implementasi: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 di Kecamatan Soreang belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan telah memiliki landasan hukum dan kerangka kelembagaan yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan operasional, seperti keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta rendahnya intensitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Solid waste management is a complex environmental issue that continues to intensify alongside population growth and changing consumption patterns. The Bandung Regency Government has responded to this challenge by enacting Regional Regulation No. 1 of 2022 on Waste Management as an effort to establish an integrated, sustainable, and participatory waste management system. This study aims to analyze the implementation of this regulation in Soreang District, Bandung Regency. The research employs Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which emphasizes two key variables determining implementation success: policy content and implementation context.

This study adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis is based on Grindle's policy implementation framework and is conducted using a descriptive qualitative approach to depict the actual conditions of policy implementation in the field.

The findings indicate that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2022 in Soreang District has not yet been carried out optimally. Although the policy is supported by a clear legal foundation and institutional framework, its implementation continues to face technical and operational challenges, including limited infrastructure, inadequate human resources, and low levels of socialization and community participation. These constraints have hindered the full achievement of effective and sustainable waste management objectives.

Keywords: *Policy Implementation, Regional Regulations, Waste Management*